PEMBERDAYAAN EKONOMI OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN DEWASA MELALUI BUDIDAYA LELE DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN

Samuel Y.C. Baransano[1], Herry Fernandes Butar Butar[2], Novia Christine Feoh[3]
Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
[1]samuelyohni21@gmail.com, [2]herryfbutar2@gmail.com, [3]noviafeoh@gmail.com

ABSTRACT

Economic empowerment is an important strategy in correctional client guidance because economic independence is closely related to successful social reintegration and the prevention of reoffending. This study analysed the process of economic empowerment through catfish farming carried out by Community Corrections Officers (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) for adult clients at the Class II Pekalongan Correctional Centre (Bapas), and identified the obstacles encountered and the efforts made to overcome them. A descriptive qualitative approach was used with purposive informant selection. Data were collected through semi-structured interviews with six informants (one PK, three adult clients, one Bapas coordinator, and one client's family member) on 7–10 July 2026, complemented by non-participant observation and documentation. The data were analysed with the interactive model of Miles and Huberman, source, technique, and time triangulation, and interpreted through Jim Ife's five dimensions of empowerment: access, participation, control, capacity, and independence. The findings show that empowerment proceeds in stages: needs assessment, programme design, motivation, training and hands-on practice from pond preparation to harvest, periodic monitoring and evaluation, and cooperation with third parties. Participation and capacity were well achieved and access was moderately achieved, whereas control and independence remain suboptimal because no client yet runs an independent business or earns a tangible income. Public stigma and limited capital were the most dominant obstacles, each mentioned by five of six informants. The PK's efforts are well directed but are not yet supported by a structured post-guidance mentoring mechanism. This study therefore proposes a Partnership-Based Sustainable Post-Guidance Economic Mentoring Programme (P2EB-K).

Keywords: economic empowerment, community corrections officer, adult clients, catfish farming, social reintegration

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi merupakan strategi penting dalam pembimbingan klien pemasyarakatan karena kemandirian ekonomi berkaitan erat dengan keberhasilan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberdayaan ekonomi melalui budidaya ternak

lele oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien dewasa di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan (satu PK, tiga klien dewasa, satu Koordinator Bapas, dan satu anggota keluarga klien) pada 7–10 Juli 2026, diperkuat observasi nonpartisipatif dan dokumentasi. Analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, dan dibaca melalui lima dimensi pemberdayaan Jim Ife, yaitu akses, partisipasi, kontrol, kapasitas, dan kemandirian. Hasil menunjukkan proses pemberdayaan berlangsung bertahap melalui asesmen, penyusunan program, motivasi, pelatihan dan praktik budidaya dari persiapan kolam hingga panen, monitoring dan evaluasi berkala, serta kerja sama dengan pihak ketiga. Dimensi partisipasi dan kapasitas tercapai, akses cukup tercapai, sedangkan kontrol dan kemandirian belum optimal karena belum ada klien yang menjalankan usaha mandiri dan memperoleh penghasilan nyata. Kendala dominan adalah stigma masyarakat dan keterbatasan modal, masing-masing disebut lima dari enam informan. Upaya PK sudah tepat arah, tetapi belum didukung pendampingan pascabimbingan yang terstruktur. Penelitian ini mengusulkan Program Pendampingan Ekonomi Berkelanjutan Pascabimbingan Berbasis Kemitraan (P2EB-K).

Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi, Pembimbing Kemasyarakatan, klien dewasa, budidaya lele, reintegrasi sosial

A. Pendahuluan

Pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai proses pembinaan yang bertujuan mengembalikan individu ke tengah masyarakat secara utuh dan produktif. Orientasi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pelaku tindak pidana diarahkan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali hidup wajar di masyarakat (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pidana, tetapi juga oleh perubahan perilaku dan kemandirian individu (Aditya, Wulandari, & Suhindarno, 2025).

Di luar lembaga pemasyarakatan, tugas tersebut dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan, yaitu mereka yang memperoleh hak integrasi seperti pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi. Pelaksana utamanya adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang tidak sekadar menjadi pengawas administratif, tetapi juga fasilitator, motivator, dan agen perubahan bagi klien. Kualitas pembimbingan oleh Bapas berperan penting dalam mendukung reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana (Aditya et al., 2025).

Klien dewasa menghadapi tekanan ganda, yaitu tuntutan untuk segera mandiri secara ekonomi di satu sisi, serta stigma dan terbatasnya akses pekerjaan di sisi lain (Sakib, 2022). Stigma membuat mantan narapidana mengalami penolakan dan keterasingan sosial (Ike, Jidong, Ike, & Ayobi, 2025), sedangkan ketiadaan sumber penghasilan meningkatkan tekanan ekonomi yang berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana (Trang & Khoi, 2023; Trivedi & Ray, 2024). Karena itu, kemandirian ekonomi menjadi fondasi reintegrasi sosial (Musakkir, Akbar, & Aurora, 2023), dan pemberdayaan ekonomi merupakan intervensi strategis, bukan sekadar pelengkap pembimbingan. Bentuknya antara lain pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, kerja sama dengan pihak ketiga, dan pendampingan usaha (Musakkir et al., 2023; Kristanto et al., 2026).

Bapas Kelas II Pekalongan menerapkan budidaya ternak lele sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi bagi klien dewasa. Usaha ini dipandang relatif mudah dijalankan, berbiaya pemeliharaan terjangkau, tidak memerlukan lahan luas, dan memiliki peluang pasar. Meskipun kajian tentang reintegrasi sosial dan residivisme sudah banyak, sebagian besar masih berfokus pada konsep, kebijakan, atau faktor penentu reintegrasi secara umum. Penelitian yang menguraikan bagaimana PK melaksanakan pemberdayaan ekonomi dalam praktik pembimbingan klien dewasa masih terbatas, dan jarang pula yang menganalisisnya dengan teori pemberdayaan Jim Ife (1995) yang mencakup dimensi akses, partisipasi, kontrol, kapasitas, dan kemandirian.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan ekonomi melalui budidaya lele oleh PK terhadap klien dewasa di Bapas Kelas II Pekalongan, serta (2) mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam

pelaksanaannya. Hasilnya diharapkan memperkaya kajian ilmu pemasyarakatan tentang pembimbingan berbasis pemberdayaan dan menjadi bahan evaluasi bagi Bapas dan PK dalam merancang pembimbingan kemandirian ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses pelaksanaan pembimbingan, pengalaman informan, kendala, dan upaya mengatasinya, bukan pada pengukuran angka atau hubungan statistik antarvariabel (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, Jawa Tengah, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Batang.

Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pembimbingan kemandirian ekonomi. Terdapat enam informan yang mewakili empat sudut pandang, yaitu pelaksana, penerima manfaat, pengambil kebijakan, dan lingkungan sosial terdekat klien (Tabel 1). Jumlah ini dinilai memadai karena jawaban dalam tiap kelompok menunjukkan pola berulang (kejenuhan data), terutama pada tema pendampingan, motivasi, modal, dan stigma.

Tabel 1 Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Sudut Pandang
Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	1	Pelaksana program
Klien pemasyarakatan dewasa	3	Penerima manfaat
Koordinator Bapas	1	Pengambil kebijakan
Keluarga klien	1	Lingkungan sosial terdekat

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur pada 7–10 Juli 2026 dengan urutan dari tingkat kebijakan, pelaksana, penerima manfaat, hingga lingkungan sosial klien. Data diperkuat dengan observasi nonpartisipatif terhadap kegiatan pelatihan dan pemanenan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan dokumen kelembagaan. Seluruh informan telah memberikan persetujuan melalui lembar *informed consent*, dan dalam artikel ini informan disebut berdasarkan perannya untuk menjaga kerahasiaan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Temuan kemudian dibaca melalui lima dimensi pemberdayaan Ife (1995) dengan indikator operasional sebagai berikut: akses (ketersediaan pelatihan, mitra, modal, dan pasar), partisipasi (keterlibatan langsung klien dalam kegiatan dan keputusan), kontrol (klien mengambil keputusan dan mengelola usaha secara mandiri), kapasitas (peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepercayaan diri), serta kemandirian (penghasilan dari aktivitas produktif tanpa bergantung pada pihak lain). Capaian dikategorikan menjadi "tercapai", "cukup tercapai", atau "belum optimal" berdasarkan konfirmasi lintas sumber. Kategori ini bersifat ordinal kualitatif, bukan pengukuran statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pemberdayaan Ekonomi Melalui Budidaya Lele

Proses pemberdayaan di Bapas Kelas II Pekalongan berlangsung bertahap dan terdiri atas enam komponen. Pertama, asesmen kebutuhan dan potensi klien yang dilanjutkan dengan penyusunan program pembimbingan. PK menyatakan bahwa asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, dan potensi setiap klien sebelum program disusun, sejalan dengan keterangan Koordinator Bapas bahwa program disesuaikan dengan kebutuhan klien dan potensi lingkungan sekitar. Kedua, PK berperan sebagai pendamping dan fasilitator, yaitu memberi arahan, mendampingi praktik, memberi konsultasi ketika ada kendala, dan menghubungkan klien dengan pelatih. Ketiga, PK memberikan motivasi dengan menekankan bahwa keterampilan yang dipelajari dapat menjadi bekal penghasilan setelah kembali ke masyarakat, serta mengangkat contoh keberhasilan peserta sebelumnya. Salah satu klien membenarkan bahwa "kami sering diberi motivasi supaya tidak menyerah dan tetap semangat belajar" (klien, wawancara 9 Juli 2026), dan keluarga turut memberi semangat dari lingkungan rumah.

Keempat, pelaksanaan teknis berupa pemberian materi dasar dan

praktik langsung mulai dari persiapan kolam, penebaran benih, pemberian pakan, perawatan, hingga panen. Observasi memperlihatkan kolam terpal beberapa petak serta keterlibatan klien bersama petugas saat pemanenan. Ketiga klien belum pernah membudidayakan lele sebelumnya, sehingga program menjadi pintu masuk keterampilan ekonomi yang baru. Kelima, monitoring dan evaluasi dilakukan berkala melalui komunikasi langsung, kunjungan, dan laporan perkembangan kegiatan. Keenam, program didukung kerja sama dengan instansi pemerintah, kelompok masyarakat, dan pihak yang ahli dalam budidaya lele. Koordinator Bapas menjelaskan bahwa lele dipilih karena relatif mudah dipelajari, tidak membutuhkan modal terlalu besar, dan peluang pasarnya cukup baik.

2. Capaian Pemberdayaan Menurut Lima Dimensi Jim Ife

Capaian proses tersebut dibaca melalui lima dimensi pemberdayaan Ife (1995) dan dirangkum pada Tabel 2. Capaian berbeda pada tiap dimensi: kuat pada partisipasi dan kapasitas, tetapi lemah pada kontrol dan kemandirian.

Tabel 2 Capaian Lima Dimensi Pemberdayaan Jim Ife

Dimensi	Temuan Utama	Capaian
Akses	Pelatihan dan mitra tersedia; modal dan pasar pascaprogram terbatas	Cukup tercapai
Partisipasi	Klien terlibat langsung dari persiapan kolam hingga panen	Tercapai
Kontrol	Belum ada klien dengan usaha mandiri di luar program	Belum optimal
Kapasitas	Keterampilan baru dan rasa percaya diri meningkat	Tercapai
Kemandirian	Belum ada penghasilan nyata; baru kesiapan	Belum optimal

Pada dimensi akses, pelatihan dan pengetahuan terpenuhi secara kuat karena seluruh klien mengikuti pelatihan yang terdokumentasi, dan jejaring kelembagaan terbuka melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Akses terhadap modal dan pasar, sebaliknya, masih terbatas. Selama program, kolam, benih, pakan, dan pelatih tersedia, tetapi ketika klien kembali ke masyarakat sumber daya itu tidak otomatis menyertai. Dalam kerangka Ife (1995), akses yang hanya hadir selama intervensi belum mengubah posisi struktural klien, sehingga dimensi ini dinilai cukup tercapai.

Pada dimensi partisipasi, klien terlibat langsung pada seluruh tahapan praktik, bukan hanya menerima materi secara pasif. Meski demikian, keterlibatan itu baru pada tingkat pelaksanaan. Tidak ada klien yang menyebut dirinya diminta menyampaikan kebutuhan atau memilih jenis usaha pada tahap asesmen. Partisipasi sebagai pelaksana berbeda dari partisipasi sebagai pengambil keputusan, padahal yang kedua menjadi prasyarat bagi kontrol.

Pada dimensi kontrol, belum ada klien yang mengelola usaha lele secara mandiri di luar program. Rencana yang disampaikan masih berupa niat, misalnya mencoba usaha kecil di rumah. Kolam, benih, pakan, dan jadwal kegiatan masih dikelola dalam lingkup program Bapas. Temuan ini perlu dibaca secara adil karena penelitian dilakukan ketika klien masih dibimbing, tetapi justru karena itu kontrol perlu dirancang sejak dini agar tidak berhenti sebagai niat. Monitoring yang berbasis kebijaksanaan PK, tanpa indikator baku, juga sulit dipakai untuk membandingkan kemajuan kontrol antarklien dan antarwaktu.

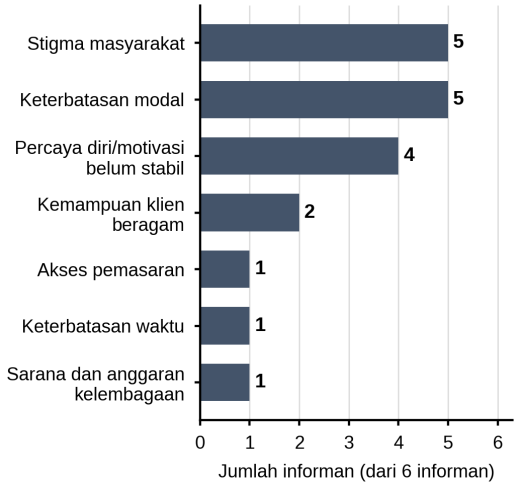
Dimensi kapasitas menjadi capaian yang paling menonjol. Seluruh klien memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis baru serta merasa lebih percaya diri, mencakup ranah kognitif (tahu cara merawat lele), perilaku (lebih disiplin dan bertanggung jawab), dan afektif (lebih optimis). Konfirmasi dari PK, Koordinator, dan keluarga memperkuat temuan ini melalui triangulasi sumber. Namun, kapasitas yang dilaporkan masih bersifat dasar, sedangkan kemampuan manajemen usaha seperti pencatatan keuangan, perhitungan biaya, dan pemasaran tidak muncul dalam wawancara. Pesan PK bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri menempatkan klien sebagai subjek perubahan, sejalan dengan prinsip *people centered development* dalam gagasan Ife (1995).

Pada dimensi kemandirian, belum ada informan yang melaporkan penghasilan nyata dari program. Seorang klien menyatakan, "belum langsung menghasilkan uang, tetapi saya merasa lebih siap kalau nanti ingin mencoba usaha sendiri" (klien, wawancara 9 Juli 2026), sementara keluarga mengamati bahwa klien kini tidak hanya bergantung pada

keluarga. Pelaksana memaknai kemandirian sebagai kesiapan (*readiness*), sedangkan klien dan keluarga memaknainya sebagai penghasilan (*outcome*). Karena indikator operasional yang digunakan adalah penghasilan tanpa ketergantungan, dimensi ini dinilai belum optimal. Dengan demikian, proses pemberdayaan ini paling tepat dimaknai sebagai tahap *capacity building* yang belum tersambung dengan akses pascaprogram.

3. Kendala dalam Pemberdayaan Ekonomi

Frekuensi kendala yang disebutkan informan disajikan pada Grafik 1. Stigma masyarakat dan keterbatasan modal masing-masing disebut oleh lima dari enam informan, kepercayaan diri oleh empat informan, kemampuan klien yang beragam oleh dua informan, sedangkan akses pemasaran, keterbatasan waktu, serta sarana dan anggaran masing-masing oleh satu informan. Frekuensi ini bukan uji statistik, melainkan indikator seberapa luas suatu kendala dirasakan lintas posisi informan.



Grafik 1 Frekuensi Kendala Berdasarkan Jumlah Informan

Kendala internal klien meliputi kurang percaya diri, motivasi yang belum stabil, kemampuan yang beragam, dan keterbatasan waktu karena pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Kepercayaan diri tidak bersifat tetap: ia meningkat dalam program yang didampingi dan menurun ketika klien membayangkan menjalankan usaha tanpa pendampingan. Kendala eksternal yang dominan adalah stigma dan modal. Temuan stigma konsisten dengan Ike et al. (2025) dan Trang dan Khoi (2023) yang menempatkan stigma sosial sebagai hambatan dominan reintegrasi. Temuan lapangan menambahkan bahwa stigma paling terasa saat klien mencari pekerjaan dan membangun usaha, sedangkan keluarga justru menjadi sumber ketahanan. Keluarga

klien juga menyampaikan bahwa pandangan masyarakat terhadap masa lalu klien membuatnya kurang percaya diri.

Keterbatasan modal sejalan dengan Sakib (2022) dan Trivedi dan Ray (2024) yang menyebutnya sebagai hambatan struktural bagi mantan narapidana. Terdapat selisih antara asumsi perencanaan dan pengalaman lapangan. Koordinator memilih lele karena modalnya tidak terlalu besar, tetapi dua dari tiga klien dan keluarga tetap menyebut modal sebagai hambatan utama. Modal yang kecil bagi lembaga belum tentu kecil bagi klien yang baru bebas, belum memiliki pekerjaan tetap, dan harus mencukupi kebutuhan keluarga. Pada tingkat kelembagaan, Koordinator menyebut keterbatasan sarana dan anggaran serta keragaman latar belakang klien, sehingga Bapas sendiri mengakui bahwa modal merupakan kesenjangan sistemik, bukan semata masalah individual klien.

4. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dan Celah yang Tersisa

Untuk mengatasi kendala tersebut, PK memberikan pendampingan yang lebih intensif sesuai kebutuhan klien, menguatkan motivasi secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi dengan mitra kerja, dan membantu membuka akses terhadap pelatihan serta peluang usaha. Koordinator menambahkan penguatan kerja sama dengan instansi, dunia usaha, dan masyarakat, perluasan akses pelatihan, serta evaluasi berkala. Upaya ini sejalan dengan pendekatan *people centered development* karena tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi juga menguatkan hubungan sosial dan kelembagaan. Pemetaan upaya terhadap kendala disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Pemetaan Kendala, Upaya, dan Celah yang Tersisa

Kendala	Upaya yang Dilakukan dan Celah
Percaya diri rendah	Motivasi berulang dan contoh keberhasilan. **Celah:** cukup menjawab selama program
Kemampuan beragam	Pendampingan sesuai kebutuhan. **Celah:** bergantung pada kapasitas PK
Stigma masyarakat	Belum ada upaya spesifik. **Celah:** belum ada edukasi publik
Modal dan pemasaran	Akses pelatihan dan peluang usaha, kerja sama mitra. **Celah:** belum ada skema permodalan dan pemasaran
Sarana dan anggaran	Penguatan kerja sama dan evaluasi berkala. **Celah:** hasil belum teramati

Tabel 3 menunjukkan tiga celah. Pertama, upaya bersifat reaktif dan bergantung pada kebijaksanaan PK tanpa mekanisme baku. Kedua, belum ada upaya yang secara spesifik menjawab stigma dan modal, padahal keduanya kendala terluas. Ketiga, seluruh upaya berpusat pada masa program, sementara kendala terberat muncul setelah klien kembali ke masyarakat. Keluarga klien mengonfirmasi celah ketiga dengan berharap pendampingan atau kerja sama dengan pihak lain tetap ada setelah program selesai. Temuan ini sejalan dengan Putra dan Equatora (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan kolaborasi lintas sektor menentukan peningkatan kemandirian ekonomi klien Bapas, serta Trang dan Khoi (2023) yang menekankan pentingnya pendampingan setelah pembebasan.

5. Usulan Program P2EB-K

Kontrol dan kemandirian merupakan dimensi yang paling lemah, sedangkan stigma dan modal merupakan kendala yang paling banyak disebut. Berdasarkan kedua temuan tersebut, diusulkan satu program terpadu, yaitu Program Pendampingan Ekonomi Berkelanjutan Pascabimbingan Berbasis Kemitraan (P2EB-K). Tujuannya meningkatkan capaian kontrol dan kemandirian ekonomi klien dewasa pascabimbingan melalui pendampingan usaha budidaya lele yang berkelanjutan. Program ini memiliki empat komponen yang saling terkait (Tabel 4): pendampingan lanjutan oleh PK, fasilitasi kemitraan permodalan awal dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, atau program tanggung jawab sosial perusahaan, pembentukan kelompok usaha bersama (paguyuban budidaya lele) untuk memperkuat jejaring pemasaran dan saling menguatkan, serta edukasi publik bersama tokoh masyarakat dan kelurahan untuk membangun penerimaan sosial terhadap klien.

Tabel 4 Komponen Program P2EB-K

No	Komponen dan Temuan yang Dijawab	Dimensi Sasaran
1	Pendampingan lanjutan: dukungan berhenti setelah bimbingan	Kontrol, kemandirian
2	Kemitraan permodalan: modal menjadi kendala bagi lima dari enam informan	Akses, kemandirian
3	Kelompok usaha bersama: percaya diri berfluktuasi dan pemasaran terbatas	Kontrol, kapasitas
4	Edukasi publik: stigma menjadi kendala bagi lima dari enam informan	Akses, kontrol

Pelaksanaan program terdiri atas enam tahap. Tahap persiapan dilakukan satu bulan sebelum masa bimbingan berakhir, yaitu mengidentifikasi klien dan memetakan mitra permodalan dan pemasaran. Dua minggu sebelum masa bimbingan berakhir, klien menerima pembekalan akhir berupa manajemen usaha sederhana, yaitu pencatatan keuangan dan pemasaran dasar, untuk melengkapi kapasitas teknis yang sudah dimiliki. Pada minggu terakhir dilakukan serah terima pendampingan dan penyusunan kesepakatan pendampingan lanjutan. Pendampingan pascabimbingan berlangsung satu sampai enam bulan setelah klien kembali ke masyarakat, sedangkan edukasi publik berjalan paralel minimal setiap tiga bulan dan evaluasi program dilakukan setiap enam bulan.

Keberhasilan program diukur melalui empat indikator, yaitu jumlah klien pascabimbingan yang masih menjalankan usaha lele (dengan kondisi awal belum ada klien yang memiliki usaha mandiri), klien yang memperoleh akses permodalan awal melalui mitra, terbentuknya sekurang-kurangnya satu kelompok usaha aktif, dan membaiknya persepsi masyarakat terhadap klien. Keberlanjutannya ditopang oleh kelompok usaha bersama sebagai wadah mandiri, kemitraan jangka panjang yang dituangkan dalam kerja sama formal, serta evaluasi berkala. Perlu ditegaskan bahwa P2EB-K masih berupa usulan yang disusun dari temuan penelitian dan belum diuji coba.

D. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi melalui budidaya lele oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pekalongan berlangsung bertahap, mulai dari asesmen dan penyusunan program, pendampingan dan motivasi, pelatihan serta praktik dari persiapan kolam hingga panen,

monitoring dan evaluasi berkala, hingga kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut lima dimensi Jim Ife, partisipasi dan kapasitas tercapai, akses cukup tercapai, sedangkan kontrol dan kemandirian belum optimal karena belum ada klien yang menjalankan usaha mandiri dan memperoleh penghasilan nyata. Proses ini paling tepat dimaknai sebagai tahap *capacity building* yang belum tersambung dengan akses pascaprogram.

Kendala yang paling dominan adalah stigma masyarakat dan keterbatasan modal, masing-masing disebut lima dari enam informan, disusul kepercayaan diri yang belum stabil, keragaman kemampuan klien, keterbatasan pemasaran dan waktu, serta keterbatasan sarana dan anggaran. Upaya PK sudah tepat arah dan efektif selama masa bimbingan, tetapi belum menjawab stigma dan modal secara spesifik serta belum didukung mekanisme pendampingan pascabimbingan yang terstruktur.

Disarankan agar Bapas memperkuat kemitraan permodalan dan pemasaran, menetapkan indikator dan format monitoring yang baku, serta mempertimbangkan penerapan P2EB-K. PK disarankan memperluas pendampingan hingga tahap pascabimbingan, menambahkan materi manajemen usaha sederhana, dan melibatkan klien dalam asesmen serta penentuan jenis usaha agar partisipasi meningkat menjadi kontrol. Mitra dan masyarakat diharapkan membuka kesempatan kemitraan dan penerimaan sosial yang lebih terbuka. Penelitian ini terbatas pada enam informan di satu lokasi, dilakukan saat klien masih dibimbing sehingga dampak jangka panjang terhadap penghasilan dan residivisme belum teramati, dan tidak memuat data kuantitatif seperti hasil panen dan pendapatan. Penelitian lanjutan dapat berupa studi longitudinal tentang keberlanjutan usaha klien, studi perbandingan antar-Bapas, dan uji coba P2EB-K.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, B., Wulandari, S., & Suhindarno, H. (2025). Public excellent service at Bapas Class II A Bojonegoro in carrying out the social reintegration function. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 9*(1), 86–103. https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i1.59423

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative,*

and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Ife, J. (1995). *Community development: Creating community alternatives—vision, analysis and practice*. Longman.

Ike, T. J., Jidong, D. E., Ike, M. L., & Ayobi, E. E. (2025). Public perceptions and attitudes towards ex-offenders and their reintegration in Nigeria: A mixed-method study. *Criminology and Criminal Justice, 25*(5), 1362–1384. https://doi.org/10.1177/17488958231181987

Kristanto, D., Permatasari, M. P., Fiatiano, E., Ervianty, R. M., Zulfa, V. R., Salam, M. D., & Dwikesumasari, P. R. (2026). Penyuluhan kewirausahaan dan pemasaran untuk klien Bapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(3), 18082–18088. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.3574

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Musakkir, M., Akbar, A. A., & Aurora, S. A. (2023). Economic reintegration as a concept of Indonesia correctional law reform. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17*(2), 135–152. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.135-152

Putra, I. D. S. W., & Equatora, M. A. (2025). Pemberdayaan klien Bapas melalui pendekatan community development untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 5560–5570.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Sakib, S. M. N. (2022). An exploration of barriers to offender reintegration: Probation and prison officer opinions vs public opinion. *CrimRxiv*. https://doi.org/10.21428/cb6ab371.57835463

Trang, N. M., & Khoi, P. M. (2023). Difficulties in reintegration of young ex-offenders. *International Journal of Education and Social Science Research, 6*(4), 353–369. https://doi.org/10.37500/ijessr.2023.6425

Trivedi, C., & Ray, S. M. (2024). Equity, empowerment, and social justice: Social entrepreneurship for formerly incarcerated individuals. *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development, 36*(1), 48–64. https://doi.org/10.1177/19394225231223388